

Pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission: Instrumen Perhatian Khusus untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pertahanan

Arbani*

Universitas Jakarta, Indonesia

Email: muhammadarbani96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini yang akan berfokus pada pembahasan mengenai pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission. Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli pertahanan, analis intelijen, dan personel militer yang terlibat dalam misi non-tempur, serta melalui analisis dokumen dan laporan resmi terkait. Hasil, Military Intelligence memiliki peran vital dalam pembuatan kebijakan pertahanan dengan menyediakan informasi untuk mengantisipasi dan menghadapi potensi ancaman, memungkinkan penilaian ancaman yang komprehensif, dan mendukung diplomasi pertahanan dengan intelijen akurat. Pendirian Badan Intelijen Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan diusulkan karena dapat mengkoordinasikan intelijen dengan operasi militer, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung misi non-combat dengan intelijen strategis. Badan ini juga memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia dengan menyediakan informasi untuk perencanaan strategis dan mendukung kolaborasi dengan industri pertahanan lokal, yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan pertahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Agar efektif, fungsi intelijen Badan Intelijen Pertahanan harus bersinergi dengan komunitas intelijen yang ada, untuk mendukung misi Indonesia menjadi Macan Asia.

Kata Kunci: Badan Intelijen Pertahanan, Military Mission, Pertahanan

Abstract

This research will focus on the importance of Defense Intelligence Agencies in Non-Combat Military Missions. This research method will use a qualitative approach with case studies to explore the importance of the Defense Intelligence Agency in Non-Combat Military Missions. The data will be collected through in-depth interviews with defense experts, intelligence analysts, and military personnel involved in non-combat missions, as well as through analysis of related documents and official reports. As a result, Military Intelligence has a vital role to play in defense policymaking by providing information to anticipate and confront potential threats, enabling comprehensive threat assessment, and supporting defense diplomacy with accurate intelligence. The establishment of the Defense Intelligence Agency under the Secretary of Defense was

How to cite:	Arbani (2024) Pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission: Instrumen Perhatian Khusus untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pertahanan, (5) 5
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission: Instrumen Perhatian Khusus untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pertahanan

proposed because it could coordinate intelligence with military operations, speed up decision-making, and support non-combat missions with strategic intelligence. The agency also strengthens Indonesia's defense diplomacy by providing information for strategic planning and supporting collaboration with the local defense industry, which contributes to enhanced national defense capabilities and economic growth. To be effective, the intelligence function of the Defense Intelligence Agency must synergize with the existing intelligence community, to support Indonesia's mission to become an Asian Tiger.

Keywords: *Defense Intelligence Agency, Military Mission, Defense*

Pendahuluan

Era pasca-Perang Dingin telah membawa perubahan struktural yang mendorong perubahan perspektif mengenai definisi, sifat, cakupan, dan praktik keamanan (security). Di Asia Tenggara dan secara global pada awal tahun 1990-an, isu keamanan non-tradisional dan keamanan militer menjadi saling berhubungan dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Mahardika, 2015). Hal ini didorong oleh perkembangan wacana pendekatan keamanan manusia (human security) yang memperluas serta memperdalam cakupan ancaman keamanan secara komprehensif, menurut pendekatan baru ini, keamanan tidak hanya mencakup keamanan tradisional atau keamanan keras (hard security), seperti aspek militer, tetapi juga elemen keamanan non-tradisional atau keamanan lunak (Dosch, 2006).

Secara tradisional, sebelumnya, ancaman keamanan dilihat dari sudut pandang kelangsungan hidup (survival) negara dan ancaman utama dari keamanan adalah konflik militer antarnegara. Kini, keamanan juga dikaitkan dengan berbagai isu non-tradisional yang berarti isu-isu di luar isu militer, yang sebagian besar bersifat transnasional atau intranasional, termasuk terorisme, degradasi lingkungan dan perubahan iklim, penyakit menular, kejahatan transnasional dan migrasi ilegal (Putriana, 2017).

Isu non-tradisional beririsan atau berada di luar lingkup ancaman negara konvensional; hal ini dikarenakan ancaman ini tidak serta merta dianggap mengancam keberadaan negara secara langsung, namun menantang kapasitas nyata atau persepsi negara untuk melindungi penduduk yang terkena dampak (Hadi, 2017). Meskipun seringkali dilihat sebagai dikotomi, dua ancaman ini memperluas agenda keamanan seluruh kawasan termasuk Asia Tenggara, yang tentunya memengaruhi Indonesia. Berbagai faktor, seperti krisis ekonomi tahun 1997-98, isu-isu lingkungan hidup lintas batas seperti kabut asap dan flu burung, terorisme, dan masalah keamanan tradisional seperti pergeseran dinamika kekuasaan di Asia-Pasifik, perselisihan di Laut Cina Selatan, dan ketegangan antar negara anggota yang diakibatkannya hingga konflik perbatasan dan teritorial yang belum terselesaikan, semuanya membawa dinamika keamanan baru yang semakin kompleks (Hidayat, Alifah, Rodiansjah, & Asikin, 2024).

Sebagai konsekuensi dari pendekatan keamanan yang lebih luas, keamanan tidak diatur oleh aturan yang dapat diprediksi; sebaliknya, hal ini bergantung pada persepsi individu terhadap ancaman, sangat bervariasi berdasarkan status dan posisi aktor dalam sistem internasional. Secara historis, konseptualisasi keamanan di Asia Tenggara oleh

aktor telah mengalami transformasi secara bertahap dan tentunya dipengaruhi oleh lingkungan serta konteks keamanan pada masa tersebut. Selama Perang Dingin dan khususnya setelah Perang Vietnam misalnya, ada kepercayaan umum adalah bahwa setiap konflik bersenjata yang signifikan di Asia Tenggara kemungkinan besar disebabkan oleh ketegangan antara negara-negara besar atau sekutu mereka, atau karena sengketa wilayah dan perbatasan yang belum terselesaikan, seperti perselisihan antara Malaysia dan Filipina atas status Sabah.

Meskipun banyak konflik teritorial masih terjadi, lanskap keamanan secara keseluruhan di kawasan ini telah mengalami perubahan signifikan sejak akhir tahun 1980an. Pada saat yang sama, globalisasi telah menyebabkan kebangkitan lokalisasi, dengan meningkatnya fokus pada isu-isu lokal dan kebangkitan konflik-konflik tradisional lokal atau intranasional yang sebelumnya dapat ditekan. Setidaknya terdapat sepuluh kompleksitas keamanan non-tradisional di Asia Pasifik yang telah muncul dalam radar para pembuat kebijakan di kawasan ini dan mulai berdampak pada keamanan Asia Tenggara: 1) Kerusakan lingkungan dan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan masalah polusi lintas batas. 2) Meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat meningkatnya permintaan pasar, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya kehutanan dan perikanan. 3) Kebijakan pembangunan. 4) Bidang demokrasi dan hak asasi manusia yang luas. 5) Migrasi legal dan ilegal dan mengakibatkan ketegangan etnis.

Walaupun sudah cukup komprehensif bukan berarti sepuluh isu di atas mencakup seluruh ancaman keamanan tradisional di Asia Tenggara. Penting untuk dicatat bahwa, sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, keamanan non-tradisional menambah tantangan serta kompleksitas keamanan yang dihadapi negara alih-alih menggantikan ancaman keamanan tradisional. Di Asia Tenggara misalnya, Negara-negara masih menghadapi ancaman keamanan tradisional yang krusial. Salah satu ancaman keamanannya adalah tekanan Tiongkok di Laut Cina Selatan yang terus berupaya meningkatkan kemampuan militernya dan hal ini berdampak pada arms race di kawasan Asia Tenggara (Bamberger, 2017). Hal ini bisa dilihat melalui grafik di bawah:

Beberapa ekonomi terbesar di Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, dan Filipina berbanding lurus dengan Tiongkok. Kenaikan anggaran keamanan ini dapat diatribusikan sebagai bentuk keseriusan negara-negara ini untuk membendung ancaman yang ada baik dalam hal ancaman tradisional maupun non-tradisional. Di Filipina, juru bicara Departemen Pertahanan Nasional di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr menekankan bahwa pada bulan Agustus 2022 semua kontrak modernisasi militer besar yang disetujui oleh pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan. Hal ini termasuk pembelian dua fregat HDC-3100 dan enam kapal patroli lepas pantai dari Korea Selatan, rudal anti-kapal BrahMos dari India dan tambahan helikopter S-70i dari Polandia.

Tidak hanya Filipina, Indonesia juga memiliki salah satu rencana pertahanan yang paling ekspansif di Asia Tenggara. Pada bulan Februari 2022, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani perjanjian dengan Prancis yang mencakup pembelian 42 pesawat tempur Rafale dan dua kapal selam kelas Scorpene. Tidak hanya itu, pada

bulan Februari, pemerintah AS menyetujui penjualan hingga 36 pesawat F-15EX ke Indonesia. Namun, rencana pengadaan besar ini – dikombinasikan dengan kontrak baru lainnya, termasuk satu untuk enam FREMM dan dua fregat kelas *Maestrale* yang dipesan dari Italia, dan satu lagi untuk dua pesawat angkut A400M – mengancam akan membebani anggaran pertahanan Indonesia, yang pada tahun 2021 memerlukan persetujuan presiden sebesar USD2,06 miliar untuk menutupi biaya peralatan dan industri pertahanan (Bamberger, 2017).

Perubahan lingkungan strategis dan politik internasional yang semakin kompleks baik secara tradisional maupun non-tradisional mendorong negara-negara untuk melakukan adaptasi serta penguatan diri secara seksama, termasuk bagi Indonesia. Meskipun Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman keamanan, saat ini Indonesia tidak serta merta berada dalam perang terbuka, serupa dengan mayoritas negara pasca-Perang Dingin. Penting untuk mencatat bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin, terjadi transformasi fungsi militer di berbagai negara. Militer yang awalnya bertugas sebagai pasukan tempur/perang mulai beralih ke peran berbeda yang berfokus pada menjaga perdamaian, menyelesaikan konflik, dan membantu otoritas politik sipil dalam menangani krisis dalam negeri (Hapsari, Putri, & Kerstan, 2022).

Istilah ini juga dikenal dengan operasi militer selain perang (OMSP) atau dua alternatif lainnya: Operasi Mendukung Perdamaian (OMP) atau Peace Support Operation (PSO) (Krainer, 2021). Dalam beberapa dekade terakhir, berkaitan dengan semakin kompleksnya tantangan serta ancaman keamanan negara baik secara eksternal maupun internal sebagaimana sebelumnya dibahas, terdapat tren positif akan implementasi OMSP atau noncombat military operations sebagai strategi militer berbagai negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan.

Tiongkok misalnya merupakan salah satu negara Big Power yang melancarkan strategi ini, mereka menyadari jika untuk mempersiapkan perlawanan perang di era teknologi yang penuh informasi diperlukan modernisasi dan reformasi struktur militer negara. Karenanya, angkatan bersenjata Tiongkok sudah mulai menekankan pentingnya melakukan berbagai operasi non-perang (*feizhanzheng junshi xingdong*) atau penggunaan militer untuk tujuan tertentu. Pada dasarnya, dalam studi keamanan internasional, para ahli secara luas percaya bahwa negara-negara akan menggunakan sumber daya yang mereka punya untuk meningkatkan dan menghasilkan kapabilitas serta keterampilan militer konvensional untuk menjalankan misi kombatan tradisional terutama untuk melawan negara lain dalam perang. Sebagian besar *rising power* di masa lalu telah menunjukkan kesesuaian dengan argumen teoritis ini, Amerika Serikat misalnya, mengembangkan doktrin “military operations other than war” setelah runtuhnya Uni Soviet tidak hanya untuk mengatasi ancaman keamanan diluar perang namun juga untuk meningkatkan kapabilitas militer angkatan bersenjata Amerika Serikat (Fravel, 2011).

OMSP mencakup berbagai upaya seperti mempertahankan, menegakkan, dan menjaga situasi damai. Tidak hanya itu, tugas OMSP juga meliputi kegiatan untuk mengawasi perdagangan senjata. Walaupun tidak melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan, OMSP lebih fokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan

bencana. Sebelum melaksanakan operasi, unit yang ditugaskan melakukan pengenalan situasi dan kondisi untuk menentukan kekuatan dan keahlian yang dibutuhkan, merencanakan tindakan, melatih personel, dan menyiapkan prakondisi untuk mencapai tujuan operasi. Tim khusus untuk pengenalan medan dapat dibentuk untuk melakukan pengamatan cepat, mengidentifikasi ancaman, berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan sebagainya (Kumar, Sharma, Vatavwala, & Kumar, 2020).

Kini, OMSP bertransformasi menjadi tugas politik yang keberhasilannya sulit terukur, tidak hanya itu, sulit untuk menentukan di mana serta dalam situasi apa tentara ditugaskan untuk melaksanakan OMSP serta kapan sebuah OMSP dianggap selesai. Misi OMSP memerlukan keterampilan yang agak berbeda dibandingkan dengan misi non-OMP, hal ini dikarenakan misi OMSP pada banyak kesempatan memiliki tantangan unik, misalnya saja: bencana alam di berbagai wilayah memerlukan teknik operasi yang berbeda, seperti gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain-lain.

Tidak sampai disitu, ketika menghadapi tindakan terorisme dan separatisme, aksi yang memerlukan penanggulangan juga bervariasi. Meskipun OMSP dianggap sebagai tugas berharga sebagaimana tugas perang, operasi perang (melawan negara atau aktor non-negara) harus menjadi prioritas jika diperlukan. Tentara harus mempertahankan fokus pada misi utamanya, yaitu perang melawan negara lain, jika situasi memaksa. Namun, jika OMSP dapat mencapai tujuan yang sama dengan efektif, operasi militer perang harus dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan OMSP memiliki risiko yang umumnya lebih rendah bagi prajurit dan negara dibandingkan dengan operasi militer perang (Sutrasna, 2023).

Pada praktiknya dalam menjalankan OMSP kelompok militer bekerja sama dengan lembaga atau organisasi yang relevan, terutama yang terkait dengan diplomasi, pemerintahan, ekonomi, dan aspek politik serta keagamaan, termasuk dengan lembaga intelijen (Purwanta, Dewi, & Karma, 2021). Meskipun begitu dalam artikel ini penulis berargumen jika penting bagi Indonesia sebagai salah satu rising power di Asia, untuk membangun Badan Intelijen Pertahanan sebagai instrumen institusi perhatian khusus untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas pertahanan Indonesia khususnya dalam menjalankan noncombat military mission (Sinaga, 2018).

Menurut penulis, pembentukan badan intelijen khusus dalam institusi militer suatu negara merupakan hal yang sangat penting karena beberapa alasan yang kuat, terutama ketika menyangkut operasi non-militer karena: (1) lembaga tersebut berpotensi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan nasional dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait potensi ancaman yang memiliki nature kompleks; (2) badan intelijen pertahanan akan meningkatkan kemampuan suatu negara untuk merespons krisis dan keadaan darurat secara efektif; (3) lembaga ini bersamaan dengan institusi militer dapat berperan penting membantu negara dalam mendukung upaya diplomasi dan pengambilan keputusan strategis.

Penelitian terdahulu oleh Waskito (2018) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa pengaruh yang ditimbulkan oleh Jepang yang menganut prinsip

pasifisme namun justru melakukan peningkatan kapabilitas militer dalam berbagai bentuk, serta untuk menggambarkan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti Cina, Korea Utara, dan India. Teori yang digunakan adalah teori realisme klasik untuk memfokuskan bagaimana keadaan dunia internasional yang bersifat anarki dapat mempengaruhi sebuah negara untuk memperkuat kapabilitas militernya sehingga muncul ketidakpastian dalam proyeksi penggunaan kapabilitas militernya.

Konsep yang digunakan adalah security dilemma dan balance of power yang digunakan untuk mengerucutkan pembahasan bagaimana prinsip pasifisme menjadi bias sehingga memunculkan pengaruh bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dalam skripsi ini ditemukan pengaruh dari peningkatan kapabilitas militer Jepang. Pengaruh tersebut yaitu terjadi sebuah *balance of power* yang dilakukan oleh Jepang di kawasan. Bentuk dari balance of power tersebut yaitu penguatan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan negara yang merupakan aliansi Jepang agar tidak memunculkan dominasi dari suatu negara di kawasan yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Ketergantungan keamanan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik menyebabkan Jepang mengembangkan kapabilitasnya dalam bidang pertahanan guna menyesuaikan kemampuan dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan aliansinya

Melalui penelitian ini, penulis akan melakukan pembahasan mengenai pentingnya pembentukan Badan Intelijen Pertahanan sebagai implementasi non-combat military mission, secara runtut artikel ini akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) latar belakang, yang telah kita lalui; (2) pembahasan yang akan berfokus pada pembahasan mengenai pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission; (3) kesimpulan dan saran kebijakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli pertahanan, analis intelijen, dan personel militer yang terlibat dalam misi non-tempur, serta melalui analisis dokumen dan laporan resmi terkait. Observasi partisipatif dan studi lapangan juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang operasionalisasi dan kontribusi intelijen pertahanan. Analisis data akan dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi peran intelijen pertahanan dalam mendukung misi non-tempur, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional militer secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

Mengapa Badan Intelijen Pertahanan Penting bagi Non-Combat Military Mission?

Pentingnya lembaga intelijen bagi operasi militer bukanlah pembahasan baru dan sudah menjadi perbincangan sejak beberapa abad kebelakang. Sun Tzu meruapakan salah satu filsuf yang mengajarkan konsep filosofi intelijen pertahanan dengan menekankan krusialnya keunggulan akan informasi sebelum terlibat dalam peperangan. Sun Tzu menekankan pentingnya untuk memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang kemampuan diri sendiri dan musuh.

Menurut Sun Tzu, memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai kedua belah pihak memungkinkan pihak yang berperang untuk terlibat dalam berbagai pertempuran tanpa risiko kekalahan. Sebaliknya, kurangnya informasi tentang musuh meski memahami kemampuan diri sendiri menghasilkan peluang yang sama untuk menang dan kalah. Ketidaktahuan sepenuhnya akan informasi tentang kedua belah pihak di sisi lain menjamin kekalahan dalam setiap pertempuran (Arbani, 2024). Sun Tzu, juga menyoroti pentingnya intelijen sebagai alat dalam membentuk keputusan dan kebijakan dalam manajemen pertahanan negara. Memahami informasi tentang musuh dan ancaman yang ada sangat berkaitan dengan pemahaman lingkungan strategis (Soewardi, 2013).

Informasi dalam konteks strategis menjadi kunci untuk mengantisipasi perkembangan ancaman keamanan di masa depan. Aspek ini mempunyai arti penting dalam membentuk berbagai formulasi kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan negara (Arief, Widjayanto, & Priyanto, 2021). Sebelum melakukan pembahasan mengenai urgensi didirikannya Badan Intelijen Pertahanan penting untuk memahami konsep Military Intelligence, Defense Policy, dan Defense Diplomacy serta kaitan diantaranya (Nurdiansyah, 2018). Konsep Military Intelligence menjadi konsep yang sangat penting karena belakangan ini, pemerintah di berbagai belahan dunia banyak mengandalkan intelijen untuk mendukung kekuatan militer mereka pada tingkat taktikal, operasional, dan strategis.

Hal ini terjadi di banyak wilayah dengan misi yang berbeda-beda, baik untuk misi luar negeri maupun di dalam negeri, serta dalam berbagai konteks, termasuk kontraterorisme, keamanan dalam negeri, serta operasi perdamaian dan upaya stabilitas kawasan (Rietjens & De Werd, 2023). Military Intelligence dapat dipahami sebagai proses sistematis pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan diseminasi informasi pendukung, yang mungkin telah diidentifikasi atau belum diidentifikasi oleh pengambil keputusan, untuk mendukung kepentingan militer suatu negara khususnya untuk menjaga keamanan (Indarta et al., 2022).

Menurut Serra, dalam konteks militer, proses penentuan sasaran Military Intelligence dimulai pada tingkat politik dengan mengidentifikasi tujuan negara dan hambatan yang ditimbulkan oleh negara lain, kekuatan, atau aktor politik mana pun yang bersaing atau menentang kepentingan negara tersebut (Marr, 2019). Setelah diidentifikasi, aktivitas, pola pikir, motif, sistem kekuatan, dan kemampuan tempur pihak lawan kemudian dianalisis. Oleh karena itu, sasaran Military Intelligence adalah setiap

ancaman militer aktual atau potensial terhadap suatu unit politik negara (Dawis et al., 2022).

Gomez mencatat bahwa tujuan Military Intelligence adalah untuk mendukung para pengambil keputusan politik dalam mencapai tujuan akhir suatu negara, yaitu mencegah perang, dan, jika perlu dan jika semua pilihan lain telah habis, untuk menyediakan kemampuan militer yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri dan kedaulatan nasional. Andriole di sisi lain menambahkan bahwa *Military Intelligence* berfokus pada seluruh aspek kekuatan militer suatu Negara baik di masa perang dan masa damai dirancang untuk mendorong menguatkan kemampuan militer (Moon, Talha, & Salehin, 2021).

Dalam definisi yang lebih singkat, Military Intelligence dapat disimpulkan sebagai proses pengumpulan data dan analisis pengetahuan untuk pengambilan keputusan oleh hierarki militer dan pemerintahan dan dalam rangka mencapai tiga tujuan: (a) evaluasi kemampuan dan motif pihak lawan; (b) meningkatkan kemampuan militer dengan meningkatkan efektivitas sistem persenjataan dan mengurangi efektivitas sistem persenjataan lawan; dan (c) superioritas intelijen menghasilkan keunggulan dibandingkan pesaingnya, khususnya dalam hal deterrence.

Berikutnya, pendefinisian defence policy erat kaitannya dengan konsep kebijakan (policy). Kebijakan dapat didefinisikan sebagai: (1) Suatu arah atau metode tindakan tertentu yang dipilih dari berbagai alternatif dan mempertimbangkan kondisi tertentu untuk memandu dan menentukan pengambilan keputusan saat ini dan masa depan; (2) Rencana keseluruhan tingkat tinggi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui prosedur yang disetujui khususnya oleh lembaga/badan pemerintahan.

Berangkat dari pemahaman ini, defence policy dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau praktik, sebagaimana didefinisikan oleh pimpinan eksekutif senior, yang dimaksudkan untuk memengaruhi dan menentukan keputusan, aksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan militer, yang konsisten serta diselaraskan dengan strategi keamanan negara. Sejalan dengan definisi kebijakan yang kedua sebelumnya, *defence policy* juga dapat didefinisikan sebagai “sebuah program untuk mempertahankan suatu negara dari musuh-musuhnya,” dimana program-programnya dapat dipahami sebagai “sebuah sistem proyek atau layanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik.” Kedua definisi yang diberikan di atas tidak saling bertentangan; sebaliknya, keduanya saling melengkapi.

Titik awal yang baik dalam diskusi mengenai *defence policy* adalah dengan memperjelas bahwa istilah *defence policy* mencakup dua aspek—yaitu, apa yang perlu dicapai—serta cara dan sarana—bagaimana dan dengan sumber daya apa tujuan tersebut ingin dicapai. Singkatnya, dalam implementasi defence policy terdapat dua tugas yang berbeda yang harus dijalankan: (1) tugas pertama adalah tentang bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, misalnya ketika terjadi ancaman keamanan; (2) menentukan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga ancaman tersebut bisa ditangani secara efektif dan dicegah untuk terjadi kembali di masa mendatang.

Pada praktiknya *Defence Policy* yang baik mencakup sebuah strategi keamanan yang baik pula, yaitu strategi keamanan yang memberikan konsep penggunaan diplomasi, ekonomi, militer, dan instrumen kekuasaan lainnya yang jelas, realistis, dan efektif untuk mencapai tujuan keamanan suatu negara. Bergantung pada penilaian terhadap risiko dan ancaman keamanan, kekuatan dan kelemahan tradisional lawan, dan peluang yang teridentifikasi—bersama dengan penilaian terhadap kerentanan diri sendiri dan musuh—strategi keamanan dapat membantu memproyeksikan berbagai angkatan bersenjata harus berperan dalam menggunakan antara instrumen kekuasaan tertentu, diplomasi misalnya.

Dalam merancang *Defence Policy*, layaknya kebijakan publik, terdapat lima tahapan formulasi kebijakan yaitu: agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sejalan dengan proses formulasi kebijakan, proses analisis kebijakan juga dijalankan dan melalui lima tahap yaitu: formulasi masalah, forecasting, rekomendasi, monitoring, dan evaluasi. Proses formulasi kebijakan yang merupakan proses politik oleh karena itu dilakukan oleh aktor politik, sedangkan proses analisis kebijakan yang merupakan proses dari seorang ahli pembuat kebijakan.

Produk tertinggi *Defence Policy* adalah undang-undang atau undang-undang nasional di bidang pertahanan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Pertahanan, dan Keputusan Menteri Pertahanan. Di Indonesia, untuk menangani tugas perumusan peraturan perundang-undangan tersebut, Kementerian Pertahanan mempunyai empat direktorat jenderal. Keempat direktorat jenderal tersebut adalah strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, kekuatan pertahanan, dan potensi pertahanan. Direktorat Jenderal merupakan unit pemrakarsa yang menyusun kebijakan pertahanan tersebut.

Selanjutnya, *defence diplomacy*. Pada dasarnya, asal usul istilah “defence diplomacy” berkaitan erat dengan perubahan pemahaman keamanan internasional dan kebijakan keamanan nasional pasca-Perang Dingin. Argumen mengenai demiliterisasi hubungan internasional, di satu sisi, merupakan hal yang melatarbelakanginya, sementara di sisi lain, persepsi yang lebih luas tentang peran angkatan bersenjata, yang melampaui peran ofensif, defensif, atau pencegahan mereka juga ikut mendorong kelahiran konsep ini.

Di Inggris, sejak akhir abad ke-20, kekuatan militer menjamin pencapaian tujuan militer jangka pendek, atau “memenangkan pertempuran”. Namun, pendekatan ini menunjukkan banyak kekurangan sebagai alat kebijakan jangka panjang. Setelah berakhirnya Perang Dingin, peran militer dianggap harus diperluas untuk menjamin perdamaian, dengan menggunakan berbagai instrumen yang berkaitan dengan operasi tentara, struktur komandonya, atau faktor politik sipil yang dapat mengawasinya. Hal ini juga terkait dengan prospek penguatan peran militer dalam diplomasi dan spesialisasinya sebagai mekanisme pencegahan ancaman internasional dan pembentukan keamanan internasional. Dalam kerangka ini, *defence diplomacy* dilihat sebagai instrumen pencegahan krisis yang efektif (Drab, 2018).

Ilmuwan politik Inggris, Andrew Cottey dan Anthony Forster, meyakini bahwa definisi defence diplomacy erat kaitannya dengan diplomasi militer. Diplomasi militer dapat dipahami sebagai serangkaian tugas khusus yang hanya dilakukan oleh perwakilan militer, atase pertahanan, atau perwakilan militer lainnya dalam menjalankan misi dan operasi perdamaian serta untuk kerja sama militer internasional. Namun, diplomasi Pertahanan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan diplomasi militer karena mencakup tujuan dan tugas diplomasi militer, namun juga mencakup isu-isu yang berkaitan dengan membangun kepercayaan, mencegah krisis dan resolusi konflik, dialog pertahanan, mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral (dalam organisasi internasional), dan juga berkaitan dengan penggunaan angkatan bersenjata dalam misi dan operasi internasional.

Defence diplomacy dapat digambarkan sebagai suatu praktik melakukan negosiasi, yang memerlukan penggunaan cara, metode dan instrumen yang tidak meningkatkan permusuhan dan, pada saat yang bersamaan, dilaksanakan berdasarkan hukum internasional. Tugas utama diplomasi pertahanan adalah membentuk hubungan militer antar negara. Kini Defence diplomacy kontemporer sedang mengalami evolusi adaptif yang berkelanjutan terhadap perubahan kondisi operasi militer dan memperluas cakupan maknanya.

Hubungan antara *Military Intelligence*, *Defence Policy*, dan *Defence Diplomacy* dapat dipahami sebagai hal mendasar yang membentuk kerangka keamanan komprehensif suatu negara, dan memainkan peran penting dalam membentuk postur keamanan suatu negara di panggung global. *Military Intelligence* erat kaitannya dengan *defence policy* karena berfungsi sebagai kerangka mendasar pengambilan keputusan dalam kebijakan pertahanan negara. Hal ini dikarenakan pengumpulan, penyebaran, dan analisis intelijen secara sistematis merupakan bagian integral bagi negara untuk mengantisipasi dan melawan potensi ancaman. Karenanya, kebijakan pertahanan yang informed sangat bergantung pada wawasan yang diberikan oleh intelijen militer, untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis berakar pada pemahaman serta informasi komprehensif mengenai lingkungan keamanan yang aktual.

Salah satu aspek penting dari interaksi antara *Military Intelligence* dengan *Defence Policy* erat kaitannya dengan peran military intelligence dalam melakukan penilaian ancaman. Kelompok intelijen mampu mengumpulkan dan memroses informasi tentang musuh potensial, kemampuan, dan niat mereka. Informasi ini menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan pertahanan, sehingga memungkinkan mereka merumuskan strategi yang mampu mengatasi ancaman yang dirasakan secara efektif. Misalnya, jika intelijen militer menunjukkan potensi perubahan lanskap geopolitik atau mengidentifikasi munculnya tantangan keamanan baru, kebijakan pertahanan dapat disesuaikan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional.

Hubungan simbiosis antara *Military Intelligence* dan *Defence Policy* mendorong respons yang dinamis dan adaptif terhadap dinamika keamanan global yang terus berkembang. Tidak hanya sampai disitu, Military Intelligence memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan pertahanan dengan memfasilitasi perencanaan kekuatan

dan alokasi sumber daya. Memahami kemampuan musuh potensial memungkinkan perencanaan pertahanan untuk menyesuaikan kekuatan militer terhadap ancaman tertentu. Pendekatan yang ditargetkan ini memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengoptimalkan kemampuan militer untuk merespons beragam tantangan. Oleh karena itu, peran intelijen militer dalam membentuk kebijakan pertahanan tidak hanya mencakup penilaian ancaman, tetapi juga mencakup penentuan posisi strategis dan pengembangan kemampuan yang diperlukan untuk mempertahankan postur pertahanan yang kredibel dan efektif.

Dalam bidang diplomasi pertahanan, *Military Intelligence* muncul sebagai satu faktor pendukung yang fundamental. Dalam menjalankan strategi pertahanan, diplomat mengandalkan informasi intelijen yang akurat dan tepat waktu untuk menavigasi hubungan internasional yang kompleks. Dengan mendasarkan pada insight intelijen, diplomat pertahanan dapat terlibat dengan pihak luar negeri secara lebih efektif, sehingga berkontribusi pada pembangunan kemitraan dan aliansi strategis jangka panjang. Sinergi antara *Military Intelligence* dan *defence diplomacy* juga dapat ditranslasikan menjadi tindakan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan keamanan bersama. Berbagi intelijen di antara negara-negara yang memiliki kepentingan sama, misalnya saja untuk mencegah terorisme, meningkatkan kesadaran situasional kolektif dan mendorong respons kooperatif terhadap ancaman bersama, sehingga memperkuat arsitektur keamanan secara keseluruhan.

Defence diplomacy, pada gilirannya, memberikan jalur diplomatik untuk informasi intelijen untuk menyelesaikan konflik dan manajemen krisis. *Military Intelligence*, melalui perannya dalam mengidentifikasi titik-titik pertikaian atau area-area yang menjadi kepentingan bersama, meningkatkan perangkat diplomasi yang tersedia bagi suatu negara. Integrasi intelijen ke dalam diplomasi pertahanan menggarisbawahi pendekatan holistik yang diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan, dengan mengakui keterkaitan strategi militer dan diplomatik.

Berlandaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Military Intelligence* memiliki peran yang strategis bagi pembentukan *defence policy* dan eksekusi *defence diplomacy*, karenanya penulis percaya jika pendirian Badan Intelijen Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan adalah salah satu kebijakan yang bisa banyak membawa dampak positif. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan, informasi intelijen tersebut dapat bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Meskipun begitu, penulis berargumen jika keberadaan Badan Intelijen Pertahanan di dalam kementerian pertahanan, memiliki beberapa keuntungan terhadap beberapa aspek diantaranya: 1) Koordinasi dan Integrasi. 2) Pengambilan Keputusan secara Real-time. 3) Pemberian Izin Keamanan dan Kepercayaan. 4) Pengalokasian Sumber Daya yang Efektif. 5) Kesatuan Visi.

Meskipun pendirian Badan Intelijen Pertahanan tentunya akan bermanfaat bagi kerangka strategi dan perencanaan keamanan negara dalam menghadapi ancaman apapun

baik secara tradisional maupun non-tradisional, sejalan dengan tren keamanan pasca Perang Dingin, mengingat semakin beragamnya ancaman-ancaman keamanan baru dan meningkatkan operasi militer selain perang, lembaga ini akan sangat relevan dalam mendukung Non-Combat Military Mission, hal ini dikarenakan keamanan kontemporer Indonesia banyak dihantui oleh ancaman non-militer dan karena keuntungan dari keberadaan lembaga itu sendiri.

Mardhani dalam artikelnya mencatat jika ancaman di Indonesia antara lain intoleransi (SARA), terorisme, demokrasi prosedural, ketimpangan reformasi birokrasi, tingginya tingkat korupsi, dan penegakan hukum yang tidak memadai²⁷. Ancaman berupa intoleransi dapat terlihat dengan meluasnya penolakan terhadap pemimpin yang berbeda keyakinan sebesar 58,4%. Indeks demokrasi Indonesia masih memiliki kesenjangan prosedural yang terlihat dari kesenjangan kebebasan sipil (78,75%), hak politik (72,49%), demonstrasi massa yang berakhir dengan kekerasan (29,22%) pada tahun 2015-2017. Selain itu permasalahan separatisme masih menghantui Indonesia, khususnya di Papua. Peristiwa separatisme yang terjadi di Papua tidak jauh berbeda dengan daerah rawan konflik lainnya.

Menurut Decky Wospakrik, Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak puas dengan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia selama Papua tetap menjadi milik Indonesia. Tujuan perlawanan OPM untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Kelanjutan perlawanan dan perjuangan OPM terjadi di berbagai wilayah di Papua yang terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 2001. Kemudian disusul dengan serangkaian penembakan di daerah pegunungan yang dengan sengaja mengganggu stabilitas keamanan di Papua, mereka disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Di luar negeri, Dinamika ancaman pertahanan Indonesia di masa depan ditunjukkan dengan pesatnya pertumbuhan persenjataan dan meningkatnya ancaman peperangan non-konvensional. Terakhir, Indonesia juga cukup rawan bencana karena posisi geografisnya. Karenanya keberadaan Badan Intelijen Pertahanan di Kementerian Pertahanan dapat membantu kelompok militer dalam menavigasikan misi non-combatan untuk menghadapi isu-isu serta tentangan keamanan yang dijelaskan sebelumnya.

Penulis mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga manfaat utama dari keberadaan Badan Intelijen untuk Non-Combat Military Mission yang muncul sebagai konsekuensi positif akan keberadaan informasi intelijen, tiga manfaat berkaitan dengan: the valuation effect, the operational effect, dan relative effect. Pertama, ketika pembuat kebijakan merencanakan anggaran nasional dan kemampuan militernya berdasarkan evaluasinya terhadap potensi, kemampuan, dan ancaman yang mungkin muncul, hal ini memungkinkan adanya margin tingkat kepercayaan yang besar. Informasi Intelijen yang komprehensif dan lebih baik dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam menilai potensi ancaman taktis dan strategis serta niat pembawa ancaman, memungkinkan pembuatan solusi yang komprehensif.

Pengetahuan yang lebih akurat mengenai kemampuan dan niat pihak lawan kemungkinan besar akan menghasilkan proses perencanaan dan pembangunan

kemampuan negara yang lebih efisien dan, dengan demikian, menghasilkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Meskipun setiap negara mempunyai pengetahuan terkait kemampuan sumber ancaman, pengetahuan ini bersifat terbatas dan, biasanya, mengandung ketidakpastian yang besar sehingga pengambil keputusan harus bersiap menghadapi menyusun, atau bahkan banyak, konfigurasi strategi operasi. Oleh karena itu, nilai intelijen bagi pembuat kebijakan bergantung pada dua hal: (a) tingkat ketidakpastian yang ingin dihadapi oleh pengambil keputusan (konservatisme pengambil keputusan), dan (b) efisiensi proses intelijen (dilambangkan dengan efisiensi intelijen). Kedua atribut ini mempengaruhi persepsi negara terhadap tingkat kemampuan lawannya, menghasilkan *evaluation effect*.

Berikutnya, intelijen yang dikumpulkan dan dianalisis akan meningkatkan kemampuan operasi militer suatu negara dengan meningkatkan efektivitas sistem strateginya dan mengurangi efektivitas sistem pertahanan lawan. Misalnya saja, operasi kontraterorisme akan jauh lebih efisien ketika informasi intelijen yang akurat dan terkini mengenai kelompok terorisme tersebut. Akhirnya, pengetahuan yang lebih banyak mengenai niat, kondisi, dan operasional lawan dapat mengarah pada implementasi sistem dan prosedur penanganan yang dapat membendung lawan bahkan tanpa aktivitas tempur sama sekali, dengan demikian, mencapai keuntungan yang signifikan, hal ini disebut sebagai *operational effect*.

Terakhir, memiliki keunggulan intelijen atas lawan mempunyai keuntungan langsung tersendiri. Investasi yang dilakukan negara di bidang intelijen, dengan membangun Badan Intelijen Pertahanan di Kementerian misalnya, secara relatif dibandingkan dengan lawannya dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi pihak lawan mengenai sejauh mana strategi lawan untuk melakukan deterrence. Hal ini disebut dengan *relative effect*. Tidak hanya sampai disitu, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan juga akan banyak membantu defence diplomacy Indonesia. Hal ini dikarenakan Intelijen memainkan peranan penting dalam *defence diplomacy*. Keberadaan Badan Intelijen Pertahanan akan membantu Diplomat untuk mendapatkan informasi intelijen yang akurat dan aktual secara real-time, karenanya hal ini akan sangat bermanfaat untuk menjadi landasan bagi pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan keterlibatan Indonesia yang efektif dan bermakna di panggung keamanan global.

Secara lebih khusus, Badan Intelijen Pertahanan dapat memainkan peran penting dalam mendukung operasi militer non-combat dalam bidang diplomasi pertahanan, khususnya dengan bersinergi bersama Kementerian Luar Negeri dalam menangani masalah keamanan global, regional, atau bahkan bilateral. Dalam operasi non-tempur, di mana aktivitas militer mungkin terfokus pada pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, atau peningkatan kapasitas, dukungan intelijen yang akurat membantu memastikan bahwa inisiatif diplomatik berlandaskan pada informasi yang akurat dan tepat sasaran sesuai dengan objektif untuk mengatasi tantangan keamanan spesifik yang dihadapi di kawasan.

Dukungan intelijen oleh Badan Intelijen Pertahanan juga berpotensi memiliki peran penting bagi diplomat untuk melancarkan penilaian risiko dan analisis ancaman,

yang pada akhirnya akan memengaruhi keberhasilan operasi militer non-combat. Dengan memahami dinamika lokal, potensi ancaman keamanan, dan lanskap sosio-politik, diplomat pertahanan dapat menyesuaikan strategi keterlibatan mereka untuk secara efektif mengatasi tantangan unik di suatu kawasan khususnya dalam menguatkan efek *deterrence*.

Terakhir, keberadaan Badan Intelijen Pertahanan memungkinkan kolaborasi dan sinkronisasi antara badan intelijen suatu negara dengan industri pertahanan lokal yang pada esensinya merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan keamanan nasional secara holistik. Kolaborasi ini memastikan bahwa Badan Intelijen Pertahanan dan industri pertahanan bekerja sama, berbagi informasi dan wawasan penting. Dengan menyelaraskan prioritas intelijen dengan kemampuan industri pertahanan, Indonesia dapat berinvestasi secara strategis dalam penelitian, pengembangan, dan produksi, sehingga menumbuhkan inovasi dan kemampuan beradaptasi. Sinergi ini memungkinkan industri pertahanan untuk mengembangkan teknologi dan solusi mutakhir yang disesuaikan untuk mengatasi ancaman spesifik yang diidentifikasi oleh badan intelijen.

Pertukaran informasi secara real-time memungkinkan adanya respons cepat terhadap tantangan keamanan yang muncul, memastikan bahwa militer tetap memiliki perlengkapan yang baik dan efektif secara operasional. Selain itu, kolaborasi ini merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memberikan arah yang jelas bagi sektor pertahanan, berkontribusi terhadap keamanan nasional dan pembangunan industri. Hubungan yang saling berhubungan antara badan intelijen pertahanan dan industri pertahanan lokal pada akhirnya memperkuat kemampuan dan ketahanan pertahanan suatu negara secara keseluruhan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Kolaborasi ini sejalan dengan amanat Presiden RI Joko Widodo yang misinya akan diteruskan oleh calon Presiden RI Prabowo Subianto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengamanatkan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri yang strategis dan juga memberikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa untuk memajukan industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri, harus diadakan kerjasama antara perusahaan negara dan swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (pasal 11) yang mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan industri terbaik yang menghasilkan industri peralatan utama, dan swasta-perusahaan milik harus mendukung industri pertahanan dengan menyediakan bahan baku, karenanya penulis menyarankan untuk dibangunnya kerja sama dengan PT. PINDAD selaku industri pertahanan lokal yang merupakan BUMN. Pada akhirnya pembentukan Badan Intelijen Pertahanan selaras dengan visi & misi Indonesia Emas 2045 untuk meningkatkan kemampuan industri strategis nasional, menguatkan konsep postur pertahanan, memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan, dan pendayagunaan industri strategis dalam negeri.

Kesimpulan

Military Intelligence memiliki peran vital dalam pembuatan kebijakan pertahanan dengan menyediakan informasi untuk mengantisipasi dan menghadapi potensi ancaman, memungkinkan penilaian ancaman yang komprehensif, dan mendukung diplomasi pertahanan dengan intelijen akurat. Pendirian Badan Intelijen Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan diusulkan karena dapat mengkoordinasikan intelijen dengan operasi militer, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung misi non-combat dengan intelijen strategis. Badan ini juga memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia dengan menyediakan informasi untuk perencanaan strategis dan mendukung kolaborasi dengan industri pertahanan lokal, yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan pertahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Agar efektif, fungsi intelijen Badan Intelijen Pertahanan harus bersinergi dengan komunitas intelijen yang ada, untuk mendukung misi Indonesia menjadi Macan Asia.

BIBLIOGRAFI

- Arbani, Muhammad. (2024). The Importance of Defence Intelligence Agencies in Non-Combat Military Missions: Instruments of Special Attention for Defence Capacity Building and Capabilities. *Advances In Social Humanities Research*, 2(4), 624–638.
- Arief, Ruslan, Widjayanto, Joni, & Priyanto, Priyanto. (2021). Kebijakan pengelolaan wilayah pertahanan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar (Studi TNI-AL). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1589–1604. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.942>.
- Bamberger, Leo. (2017). International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2017. 2017. *SIRIUS-Zeitschrift Für Strategische Analysen*, 1(3), 309–310.
- Dawis, Aisyah Mutia, Himawan, Irfan Sophan, Meidelfi, Dwiny, Ikhran, Faisal, Intan, Indo, Harun, Rofiq, Haris, M. Syaunqi, Wahyuddin, S., Yuniar, Eka, & Purnomo, Rakhmat. (2022). *Artificial Intelligence: Konsep Dasar Dan Kajian Praktis*. TOHAR MEDIA.
- Dosch, Jörn. (2006). The concept and management of non-traditional security in Southeast Asia. *Sicherheit Und Frieden (S+ F)/Security and Peace*, 179–184. <https://doi.org/10.5771/0175-274x-2006-4-179>.
- Drab, Lech. (2018). Defence diplomacy—an important tool for the implementation of foreign policy and security of the state. *Security and Defence Quarterly*, 20(3), 57–71.
- Fravel, M. Taylor. (2011). Economic growth, regime insecurity, and military strategy: explaining the rise of noncombat operations in China. *Asian Security*, 7(3), 177–200. <https://doi.org/10.1080/14799855.2011.615080>.
- Hadi, Rany Purnama. (2017). Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia. *Transformasi Global*, 4(1).
- Hapsari, Paundria Dwijo, Putri, Awallia Septiyana, & Kerstan, Henzie. (2022). Legal Policy for Drug Users in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Creativity Student*, 7(1), 35–66.
- Hidayat, Agus Rohmat, Alifah, Nur, Rodiansjah, Agis Ahmad, & Asikin, Muhammad Zaenal. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 568–578.
- Indarta, Yose, Ranuharja, Fadhli, Ashari, Ilham Firman, Sihotang, Jay Idoan, Simarmata, Janner, Harmayani, Harmayani, Algifari, M. Habib, Muslihi, Muhammad Takdir,

- Mahmudi, A. Aviv, & Fatkhudin, Aslam. (2022). *Keamanan Siber: Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Krainer, Konrad. (2021). Implementation as interaction of research, practice, and policy. Considerations from the Austrian initiative IMST. *ZDM—Mathematics Education*, 53(5), 1175–1187.
- Kumar, Bipul, Sharma, Arun, Vatawala, Sanket, & Kumar, Prashant. (2020). berkomunikasi. *Industrial Marketing Management*, 85, 126–140.
- Mahardika, Pustaka. (2015). *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Marr, Bernard. (2019). *Artificial intelligence in practice: how 50 successful companies used AI and machine learning to solve problems*. John Wiley & Sons.
- Moon, Nazmun Nessa, Talha, Itakhar Mohammad, & Salehin, Imrus. (2021). An advanced intelligence system in customer online shopping behavior and satisfaction analysis. *Current Research in Behavioral Sciences*, 2(June), 100051. <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100051>
- Nurdiansyah, Dickry Rizanny. (2018). *Strategi dan Pertahanan Maritim Nusantara: Maritim Nusantara*. diandra press.
- Purwanta, I. Wayan Kusuma, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Karma, Ni Made Sukaryati. (2021). Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 123–127.
- Putriana, Ika. (2017). Peran Gender Perempuan Militer dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat" Melati Pagar Bangsa". *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 37–42.
- Rietjens, Sebastiaan, & De Werd, Peter. (2023). Intelligence and the Military: Introduction. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, Vol. 36, pp. 1041–1046. <https://doi.org/10.1080/08850607.2023.2215690>
- Sinaga, Fransiska Adelina. (2018). Urgensi Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dalam Menanggulangi Aksi Terorisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 237–247.
- Soewardi, Bagus Artiadi. (2013). Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang tangguh bagi Indonesia. *Media Informasi Ditjen Pothan Menhan*, 31–35.
- Sutrasna, Yudi. (2023). STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MILITER DAN NON MILITER MELALUI PRESPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN. *Journal of Syntax Literate*, 8(7).
- Waskito, Muhammad Unggul. (2018). *Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan Di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2014–2017*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

Copyright holder:

Arbani (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

